

## **Kerjasama India-Vietnam dalam Eksplorasi Minyak sebagai Resistensi atas klaim China di Laut China Selatan**

*India-Vietnam Cooperation in Oil Exploration as Resistance of China's Claims in South China Sea*

Nurul Adi Prasetyo, Sugiyanto Eddie Kusuma, Muhammad Iqbal  
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto, Jember, Kotak Pos 159  
E-mail: [nuruladiprasetyo@gmail.com](mailto:nuruladiprasetyo@gmail.com), [cacakiqbal@gmail.com](mailto:cacakiqbal@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is aimed to found an effective way from India to resist China in the region of South China Sea. The South China Sea itself is a region that can not be separated from the conflict caused by the energy potential. One of the epicenters of conflict is the potential energy contained in the South China Sea. The cruise line is also a major base that makes the South China Sea region as an area of influence in the foreign policy activities of other countries. Escalation of the conflict in the South China Sea started precisely on in 1936 at which time the Government of the Republic of China officially announced its boundary lines, known as "The Nine-Dashed Line". China's actions in the past are evidence that China seeks to strengthen its position as the hegemon in the South China Sea. The country that feel threatened by the dominance of China in the South China Sea region is India. India then attempted to overcome these threats by making Vietnam as a partner in the fight against the hegemony of China in the South China Sea. India with Vietnam embodies resistance against the hegemony of China in the South China Sea by conducting joint oil exploration in areas claimed to belong to China. When referring to the United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) in 1982 conducted by the Indian cooperation with Vietnam actually has legality internationally.*

**Keywords:** *energy, South China Sea, India, Vietnam, national interest*

### **A. PENDAHULUAN**

Energi merupakan salah satu elemen pokok untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh bagi suatu negara. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan rawab konflik yang disebabkan adanya potensi energi yang dapat dieksplorasi oleh sebuah negara.

Salah satu episentrum timbulnya konflik dalam Kawasan Asia Pasifik adalah potensi energi yang terdapat dalam Laut China Selatan. Laut China Selatan merupakan kawasan yang diperkirakan mengandung minyak sebesar 11 bbl (*billion barrels*) dan 190 triliun meter kubik. Selain sumber daya alam di Laut China Selatan, jalur pelayaran juga

menjadi dasar utama yang menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai kawasan yang berpengaruh dalam aktivitas politik luar negeri negara-negara lain (Energy Information Administration, 2013).

Eskalasi konflik di Laut China Selatan dimulai tepatnya pada tahun 1936 di mana pada saat itu Pemerintahan Republik China secara resmi mengumumkan garis batas wilayahnya yang dikenal dengan *The Nine-Dashed Line* (Ott, 2010: 1). Peningkatan eskalasi konflik mulai terjadi pada tahun 1995 di mana pada saat itu China, Taiwan, Filipina, serta Vietnam terlibat konflik di Kepulauan Spratly yang menyebabkan beberapa kapal laut Vietnam tenggelam dan 70 prajurit Vietnam gugur (Suharna, 2012: 33). Adapun penyebab dari konflik ini adalah ditemukannya indikasi bahwa China sedang membangun kekuatan militer di Kepulauan Spratly oleh Filipina (Ott, 2010: 1).

Upaya diplomatik telah berusaha diupayakan oleh negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa ini, namun China sampai saat ini masih tetap konsisten mempertahankan *The Nine-Dashed Line* miliknya. ASEAN yang merupakan wadah dari beberapa negara

yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, serta Indonesia pernah melakukan upaya mediasi dengan China terkait sengketa di wilayah tersebut yang kemudian melahirkan *Declaration on the Conduct of Parties* di Laut China Selatan pada tahun 2002, namun China menolak untuk tunduk pada deklarasi tersebut. China menginginkan bahwa upaya damai yang dilakukan di wilayah Laut China Selatan harus berdasarkan diplomasi bilateral (Gupta, 2013: 5).

Penguasaan sepenuhnya atas wilayah Laut China Selatan dapat menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Salah satu negara yang merasa terancam dengan dominasi China yang semakin kuat dalam regional Laut China Selatan adalah India. India merupakan negara yang mempunyai kepentingan dalam *energy security* untuk kebutuhan domestik (Khandekar, 2011: 1).

India merupakan negara yang memiliki reputasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Produk Domestik Bruto di atas 2,7% pada 2011) bersama negara-negara lain seperti Brazil, Russia, India, China (BRIC). Negara-negara tersebut adalah negara yang mempunyai pengaruh penting dalam pasar energi Internasional.

India dan China contohnya, adalah negara yang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap energi. Beberapa analis bahkan memprediksikan bahwa ketergantungan impor energi kedua negara ini akan mencapai skala 60-91% (China 60-80% dan India 91%) hingga tahun 2030. Kondisi seperti ini kemudian melahirkan upaya India dan China untuk terus memperluas ladang minyaknya (Marin, Tanpa Tahun: 1).

Vietnam dalam hal politik luar negeri memiliki kesamaan kepentingan kemudian mewujudkan kesamaan tersebut dalam kerjasama minyak di Laut China Selatan (Singh, 2007: 4). Ijin eksplorasi *Oil and Natural Gas Commission Videsh Limited* (ONGC Videsh Ltd.) kepada pemerintah Vietnam untuk pertama kali diperoleh pada Mei 1988. Pada saat itu OVL mengakuisisi blok 6.1 di lepas pantai Vietnam dan memperoleh 45% *Participating Interest* (PI) (Expose India Live, 2012). OVL kemudian melanjutkan produksi secara komersil pada tahun 2003. Pada tahun 2006, OVL mengakuisisi lagi dua blok minyak di Laut China Selatan yaitu blok 127 dan 128. Tetapi blok 127 kemudian dikembalikan kepada pemerintah Vietnam karena tidak ditemukan adanya hydrocarbon (Tim Redaksi, 2012). Namun, pemerintah Vietnam tetap meyakinkan

OVL untuk tetap melanjutkan pengeboran di Blok 128 dan menyatakan bahwa wilayah Blok 128 berada dalam perairan Vietnam. Permintaan dari Vietnam tersebut pada akhirnya meyakinkan India untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam eksplorasi hidrokarbon selama tiga tahun pada tahun 2011 (Vivekananda International Foundation India, 2013).

Pada akhir tahun 2013 Perdana Menteri India Mammohan Singh menerima kunjungan negara Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong guna. Kunjungan tersebut kemudian menghasilkan sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah Vietnam dengan India yang mana salah satu butirnya menjelaskan tentang beberapa blok minyak baru yang ditawarkan oleh pemerintah Vietnam kepada India (Tim Redaksi, 2013). Dari berbagai sumber yang diketahui setidaknya terdapat tujuh blok baru yang ditawarkan oleh PetroVietnam kepada India. Tujuh blok minyak baru yang ditawarkan yaitu blok 17, 41, 43, 10, 11-1 & 102 dan 106/10 (Tim Redaksi, 2013).

Masalahnya, situasi semakin rumit ketika Perusahaan Minyak Nasional China yaitu CNOOC juga membuka sembilan blok di kawasan yang menjadi wilayah

kerjasama antara India dengan Vietnam. China mengumumkan pembukaan sembilan blok ini secara resmi pada 25 Juni 2012 di mana dalam pembukaan sembilan blok tersebut, blok 128 yang telah dikelola oleh ONGC menjadi salah satu wilayah yang mengalami tumpang tindih kawasan (*overlapping area*) (Reischer, 2012).

Jika mengacu pada *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, kerjasama India dengan Vietnam sebenarnya telah memiliki legalitas secara Internasional. Namun, China mengeluhkan kerjasama eksplorasi minyak bersama antara PetroVietnam dengan OVL. Pada tahun 2011, Pemerintah China pernah menyatakan bahwa kawasan Laut China Selatan merupakan daerah yang *indisputable* atau kawasan yang tidak perlu untuk dipermasalahkan (Tim Redaksi, 2012). Sebagai salah satu negara yang mempunyai pengaruh besar dalam pasar energi, maka tidak salah apabila menilai India merupakan salah satu penantang serius dalam melawan ambisi China menguasai kawasan Laut China Selatan (Pant, 2012).

Ambisi China untuk dapat sepenuhnya menguasai wilayah Laut China Selatan adalah sebuah ancaman

potensial bagi kerjasama India dengan Vietnam. Hegemoni China di wilayah ini juga berpotensi untuk dapat mengganggu kepentingan nasional India. Kontrol sepenuhnya atas lalu lintas maritim di Laut China Selatan oleh China akan memiliki dampak yang signifikan bagi kepentingan nasional India terlebih dalam Implementasi kebijakan *look east* India (Majumdar, 2013: 244). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis karya tulis yang membahas efektivitas kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam dalam resistensi atas klaim China di Laut China Selatan.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **Konsep Resistensi**

Resistensi dapat dipahami cukup luas sebagai proses sadar yang mencoba untuk mengubah praktek-praktek yang tidak diinginkan, proses yang sedang berlangsung dalam bentuk strategi politik tertentu melawan sesuatu. Resistensi dengan demikian dapat dianggap sebagai bentuk, atau cara pengorganisasian, kekuatan yang bertujuan untuk mengubah praktek-praktek politik yang tidak diinginkan dan / atau kekuasaan yang ada. Sampai saat ini, resistensi telah dipahami sebagai gerakan perlawanan, biasanya



didefinisikan sebagai gerakan terorganisir berkomitmen untuk menolak (mencoba untuk mengubah) kebijakan pemerintah (atau penguasa kedudukan) dengan salah satu kekerasan atau tanpa kekerasan berarti (Seppala, 2010: 38).

Fenomena resistensi dalam kerjasama eksplorasi minyak antara India dan Vietnam merupakan salah satu fenomena yang mengejawantahkan konsep resistensi. Berawal dari adanya klaim yang dilakukan China hingga kemudian memunculkan resistensi dari India dan Vietnam. Situasi semakin kompleks ketika China dengan sepihak melakukan sabotase terhadap aktivitas eksplorasi minyak Vietnam yang menjadikan China sebagai pihak yang tidak diinginkan oleh Vietnam.

### **Konsep Hedging**

Hedging adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk menghindari situasi di mana negara tidak bisa memutuskan *balancing*, *bandwagoning*, atau *netralitas*. Evelyn Goh mengemukakan konsep ini dengan tiga elemen utama dalam konteks memahami negara-negara Asia Tenggara, yaitu: *Indirect Balancing* atau *soft balancing*, kerjasama kompleks (*complex engagement*), dan *enmeshment strategy* (Goh, 2005: viii).

*Indirect balancing* atau *Soft*

*Balancing* dapat diartikan sebagai upaya perimbangan kekuatan secara tidak langsung misalkan Amerika Serikat yang ingin mengimbangi kehadiran Cina di kawasan Laut China Selatan melalui ASEAN. Kerja sama kompleks (*complex engagement*) dilakukan untuk menghadapi Cina di kawasan dengan harapan Cina mau konform terhadap norma-norma yang telah ada. *Enmeshment* merupakan strategi untuk mengundang negara-negara kuat untuk masuk terlibat ke dalam kawasan dengan harapan mereka menjadi memiliki andil dan kepentingan untuk ikut menjaga stabilitas kawasan (Goh, 2005: viii).

### **Konsep Kerjasama Internasional**

Kalevi Jaakko Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu. Pandangan atau harapan dari suatu negara ini adalah bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingannya. Persetujuan tertentu antara dua negara atau lebih adalah dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi

antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1988: 652-653).

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara barat dicorakkan oleh interdependensi kompleks. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi untuk memajukan kerjasama lintas batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya, institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama (Jackson & Sorensen, 2005: 63-64).

### **Konsep Ekonomi Politik Internasional**

Ekonomi Politik Internasional (EPI) merupakan studi tentang keterkaitan dan interaksi antara politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dengan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat (Mas'ood, 2003: 4). Ekonomi politik internasional adalah bagaimana cara mendapatkan kekayaan melalui kekuasaan dan adanya interrelasi antara pasar dan politik. Hubungan antara ekonomi dan politik ditekankan pada kepentingan nasional atau

national interest karena perhatian besar dari adalah mengenai isu-isu tentang kekayaan dan kemiskinan, tentang siapa mendapat apa dalam sistem internasional (Jackson & Sorensen, 2005: 228).

Setiap negara tentunya menginginkan keuntungan yang besar bagi negaranya, untuk itu keputusan dan tindakan-tindakan politik dibutuhkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Oatley, 2004: 96). Robert Gilpin dalam bukunya "*The Nature of Political Economy*" pernah menjelaskan bahwa negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan power dan pengaruh (Gilpin, 2001: 78).

### **Konsep *Energy Security***

Dunia internasional saat ini telah mencapai masa dimana kebutuhan akan minyak tidak dapat lagi dikatakan sebagai kebutuhan dengan biaya terjangkau (Hiscock, 2012: 12). Tren permintaan energi global yang semakin meningkat adalah beberapa indikator utamanya. Inilah menjadi landasan negara-negara besar untuk berusaha memperluas ladang energi mereka. Faktor tersebut kemudian menjadikan sumber daya energi di Laut

China Selatan menjadi salah satu opsi untuk dapat menolong negara-negara dalam hal ketidakamanan energi (Rogers, 2013: 1).

Tidak ada standar khusus dalam permasalahan *energy security*, mayoritas analisis mendefinisikan *energy security* sebagai sebuah urgensi bagi negara untuk menjamin kecukupan pasokan energi bagi negaranya baik di saat damai ataupun krisis internasional (Williams, 2008: 484). Negara selalu dituntut untuk mendapatkan persediaan energi yang efisien. Tuntutan tersebut adalah untuk kebutuhan nasional karena kebutuhan energi akan berkesinambungan dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, pertumbuhan industrialisasi, pendapatan yang bertambah (Williams, 2008: 485).

### **Konsep Geopolitik**

Konsep geopolitik adalah perpaduan antara kondisi geografis dengan kekuatan tiap-tiap negara dalam regional tertentu dalam mewujudkan kepentingan nasional mereka atau dalam arti lain geopolitik dapat didefinisikan sebagai sebuah rasionalisasi kekuatan politik. Dalam pengertian lain geopolitik adalah pertempuran antara ruang dan power yang dimainkan dalam letak geografis yang didalamnya mencakup geopolitik militer, diplomasi geopolitik, dan juga geopolitik

energi. Untuk sumber daya alam dan jalur perdagangan yang membawa sumber daya kepada konsumen merupakan pusat studi geopolitik karena setiap tatanan internasional saat ini adalah berdasarkan pada sumber daya energi (Kaplan, 2014).

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Dengan menggunakan studi literatur, maka penulisan cukup merujuk pada informasi yang sudah ada dan dianggap memiliki tingkat relevansi dengan fenomena yang dianalisa. Sehingga dalam hal ini, data-data yang digunakan sebagai bahan penunjang merupakan jenis data sekunder. Data-data yang digunakan berasal dari koleksi pribadi, perpustakaan pusat Universitas Jember, perpustakaan FISIP Universitas Jember, situs internet dan media cetak. Sedangkan dalam analisa berfikir, digunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif berangkat dari prinsip-prinsip umum yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah atau khusus. Setelah itu masing-masing preposisi diuji dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus-kasus khusus tersebut bisa dijelaskan atau bahkan diramalkan berdasarkan kerangka pemikiran yang dipakai (Mas'ood, 1994:

80).

#### D. HASIL PENELITIAN

India merupakan salah satu negara dengan kebutuhan energi cukup besar sampai saat ini, bahkan hampir menyamai dependensi energi dari China. Reputasi India sebagai negara *emerging economy* memiliki ambisi untuk menyaingi kekuatan China pada regional Laut China Selatan. Jika India tidak mengambil langkah preventif untuk menanggulangi dominasi China dalam kawasan Laut China Selatan, maka konsekuensi logis yang akan ditanggung oleh India adalah semakin kuatnya dominasi China dalam kawasan tersebut. Semakin kuatnya dominasi China di Laut China Selatan tentunya dapat memberikan hambatan tersendiri bagi perekonomian India terutama akses perekonomian bagi perdagangan India di Laut China Selatan. Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam menjadi efektif sebagai resistensi atas klaim China di Laut China Selatan.

#### Implementasi *Look East Policy*

Kerjasama bilateral yang dijalin antara India dengan Vietnam adalah respon India atas penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Vietnam. Hal ini juga

sesuai dengan Kebijakan LEP India yang menjadikan ASEAN sebagai inti dari kebijakan tersebut dimana Vietnam termasuk salah satu negara bagian dari ASEAN.

Robert Keohane dan Joseph Nye telah berpendapat bahwa ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi untuk memajukan kerjasama lintas batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya, institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama (Jackson & Sorensen, 2005: 63-64). Kerjasama India dengan Vietnam merupakan representasi dari interdependensi yang diwujudkan dalam serangkaian persetujuan. Serangkaian persetujuan tersebut adalah untuk memberikan efisiensi terhadap nilai dari kerjasama sehingga memberikan dampak pada tercapainya kepentingan masing-masing. Efisiensi dalam informasi juga diperlukan dalam wujud persetujuan tersebut sebagai akses untuk mengetahui aktivitas dan isu-isu yang perlu untuk dihadapi bersama.

India berusaha mendapatkan kekayaan melalui interrelasi antara pasar



dan politik tanpa melupakan kepentingan nasional yang menjadi tujuan dasar dalam berdiplomasi. Secara ekonomi politik, India berdiplomasi melalui kebijakan LEP untuk menjalin kekerabatan secara ekonomi maupun politik dengan Vietnam demi kepentingan nasionalnya. Keterkaitan India dengan Vietnam kemudian dibuktikan oleh pernyataan Perdana Menteri Manmohan Singh yang menegaskan kembali arti penting dari Vietnam sebagai mitra strategis.

*"Kami telah berusaha untuk membangun hubungan yang komprehensif dengan agenda berbasis kerjasama bilateral dan regional. Munculnya Vietnam sebagai salah satu negara perekonomian paling dinamis di kawasan Asia Pasifik sangat disambut baik oleh India, terutama karena kami menganggap Vietnam sebagai mitra strategis dan terpercaya serta istimewa dan salah satu pilar penting dari Look East Policy kami (The New India Express, 2013)."*

Robert Gilpin menyatakan dalam bukunya *Global Political Economy* bahwa negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut maka negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan pasar dan pengaruh (Gilpin, 2001: 78). Jika memandang persetujuan

India dalam perspektif Gilpin tersebut, maka India dapat dikatakan berusaha memenuhi kepentingannya dengan meningkatkan pengaruhnya di kawasan Laut China Selatan. India berusaha meningkatkan pengaruhnya di kawasan Laut China Selatan dengan merangkul Vietnam sebagai mitra utama. Peningkatan pengaruh India di kawasan Laut China Selatan dirasakan oleh India menjadi begitu penting mengingat India memerlukan kondisi pasar yang berpihak terhadap kepentingannya secara ekonomi untuk memanipulasi kekuatan China di kawasan Laut China Selatan.

#### **Upaya mengamankan Akses Energi di Laut China Selatan.**

Paul D. Williams menjelaskan bahwa kompleksitas peradaban manusia akan menuntut manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka yang paling dasar yaitu energi. Dalam konteks kehidupan yang lebih modern, kebutuhan akan energi sangat dibutuhkan dalam menunjang maksimalnya output yang akan dikeluarkan oleh industri-industri di sebuah negara. Output yang maksimal dari industri-industri tentunya akan membawa pendapatan yang tinggi bagi industri-industri yang kemudian berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat (Williams, 2008: 484).

India memiliki kewajiban untuk dapat mencukupi kebutuhan energi warga negaranya. konsekuensi dari kurangnya stok energi akan dapat menghambat pembangunan ekonomi bagi India, sehingga prioritas utama pemerintahan India dalam jangka panjang adalah menyediakan akses energi bagi seluruh warga Negara (Ahn, S, J. & Graczyk, D, 2012: 243).

### **Memperjuangkan Kebebasan Navigasi di Laut China Selatan**

India merupakan salah satu pengguna jalur perdagangan Laut China Selatan yang tidak menginginkan China untuk menguasai kawasan tersebut. India khawatir bahwa jika China menguasai jalur perdagangan tersebut maka China akan leluasa untuk mengendalikan lalu lintas perdagangan dalam kawasan ini (Majumdar, 2013: 243). China akan memiliki senjata geopolitik (*geopolitical weapon*) yang sangat menentukan stabilitas perdagangan banyak negara, terutama India, apabila China berhasil menguasai kawasan Laut China Selatan. India tentunya tidak akan senang ketika China berhasil mengakuisisi senjata geopolitik ini, kepemilikan atas Laut China Selatan dapat merugikan India dalam sektor ekonomi terlebih jika mencermati hilir-mudik kapal-kapal India dalam

kawasan ini.

Geopolitik merupakan pertempuran antara ruang dan kekuatan yang dimainkan dalam letak geografis yang didalamnya mencakup geopolitik militer, diplomasi geopolitik, dan juga geopolitik energi. Menurut Robert D. Kaplan, saat ini tatatan internasional dalam peradaban yang lebih modern sangat ditentukan oleh sumber daya energy (Kaplan, 2014). India dengan China berusaha memainkan ruang dan kekuatan mereka dengan menggunakan sarana geografis yang mendukung kepentingan mereka masing-masing. Ruang yang dimaksud adalah sengketa eksplorasi minyak ini adalah Laut China Selatan, tepatnya dalam ZEE Vietnam, sedangkan kekuatan yang dimaksud adalah penggunaan kekuatan dari masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan geopolitiknya. Perlawanan geopolitik India secara resmi dapat dilihat dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri India yang telah menyatakan sikap atas upaya China menguasai Laut China Selatan.

*"Kami telah mengikuti perkembangan terakhir di Laut Cina Selatan. Kami percaya bahwa pemeliharaan perdamaian, stabilitas, pertumbuhan dan kemakmuran di kawasan itu adalah kepentingan vital bagi*

*masyarakat internasional. Kami ingin melihat penyelesaian masalah melalui damai yang berarti sesuai dengan prinsip yang diakui secara universal oleh hukum internasional. dalam konteks ini, kami juga mempertahankan bahwa kebebasan navigasi di laut Cina Selatan tidak boleh dihalangi dan panggilan untuk kerjasama dalam menjamin keamanan jalur laut dan penguatan keamanan maritime (Ministry of External Affairs, Government of India, 2011)."*

India memiliki kepentingan geopolitik dalam wilayah ZEE Vietnam sebagai jalan untuk membuka kebebasan navigasi mereka dalam kawasan Laut China Selatan. Hal tersebut dilakukan India untuk mengantisipasi agar hegemoni yang diinginkan China dalam kawasan Laut China Selatan tidak terjadi.

### **Prospek Kerjasama Eksplorasi Minyak India-Vietnam di Laut China Selatan dalam fungsinya sebagai resistensi atas klaim China di Laut China Selatan**

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, Kerjasama Internasional merupakan Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih adalah dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan

mereka (Holsti, 1988: 652-653). India dengan Vietnam merupakan representasi dari kerjasama internasional secara bilateral. India dengan Vietnam menghadapi isu yang sama secara regional, khususnya dalam menangani pengaruh China dalam kawasan Laut China Selatan. Komitmen Vietnam untuk menjaga peran India dalam kawasan Laut China Selatan terlihat dalam MoU yang dijalin kedua negara pada tahun 2013. Hal ini kemudian dikuatkan oleh pernyataan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung:

*"India sangat menghargai peran aktif Vietnam dan kontribusinya di ASEAN dan di wilayah tersebut. Vietnam menegaskan kembali dukungannya terhadap Kebijakan Melihat ke Timur India menuju Asia Tenggara serta peran India yang semakin penting di kawasan tersebut dan dunia pada umumnya (Ministry of External Affairs Government of India, 2014)."*

Kerjasama India dengan Vietnam adalah kerjasama yang dapat dikatakan sebagai kerjasama yang prospektif. Kedua pihak memiliki kesamaan kepentingan yang mendasari kerjasama mereka. Penawaran tujuh blok minyak baru dari Vietnam kepada India merupakan bukti konkrit bahwa Vietnam menginginkan India dalam eksplorasi minyak.



## Sikap Politik China atas kerjasama India-Vietnam

China merupakan negara yang memiliki ambisi untuk dapat menguasai Laut China Selatan dan berbagai sumber daya alam di dalamnya. Ambisi China sangat berdasar mengingat China merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat progresif. Konsekuensi dari progresivitas perekonomian China tersebut tentu saja membawa konsekuensi kepada China untuk dapat mencukupi kebutuhan energi domestiknya. Hal tersebut mutlak diperlukan China untuk dapat menjamin legitimasi politik serta stabilitas sosial dari masyarakatnya (Caceres, 2014: 45).

Kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam dianggap oleh China merupakan provokasi politik (Khrisnan, 2011). China sempat mengajukan *demarche* kepada India atas kerjasama yang mereka lakukan yang dianggap melanggar kedaulatan dari China, namun India tetap menjalankan aktivitasnya di Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri India berpendapat bahwa kerjasamanya di Vietnam telah memiliki legalitas yang sah menurut hukum internasional.

*"China memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi kita akan tetap dengan apa*

*yang pemerintah Vietnam telah katakan kepada kami, dan telah menyampaikan hal ini kepada China (2 Point 6 Billion, 2011)."*

Setelah pengajuan *demarche* atas kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam, China terus memperingatkan India agar tidak turut campur dalam permasalahan di Laut China Selatan. China bahkan mengancam bahwa jika kerjasama India dengan Vietnam tetap dilakukan, maka China akan mengirim pasukan non-militer yang akan mengganggu aktivitas mereka di Laut China Selatan (Tim Redaksi, 2011).

Sikap politik China terhadap kerjasama India dengan Vietnam juga terkesan ragu-ragu. Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan resmi dari pemerintah China yang tidak menginginkan adanya keterlibatan negara-negara lain dalam sengketa Laut China Selatan, namun China tidak menyebutkan India sebagai negara-negara yang terlibat sengketa. Berikut adalah pernyataan Jiang Yu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China:

*"Posisi kami yang konsisten adalah bahwa kami menentang negara manapun yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas di perairan di bawah yurisdiksi China. Untuk negara-negara di*



*luar regional tersebut, kami berharap mereka akan menghormati dan mendukung negara-negara di kawasan itu untuk memecahkan sengketa ini melalui pembicaraan secara bilateral (Khrisnan, 2011)."*

Dari pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China tersebut, terlihat bahwa China belum cukup berani untuk secara terang-terangan terprovokasi oleh Kerjasama India dengan Vietnam. China justru bereaksi atas kerjasama Vietnam dengan India dengan membuka sembilan blok minyak baru yang berada dalam wilayah ZEE Vietnam. Jika masuknya India ke dalam wilayah Laut China Selatan merupakan fenomena "memancing di air keruh", maka pembukaan Sembilan blok minyak China dalam kawasan ZEE Vietnam adalah fenomena yang sama dengan masuknya India dalam kawasan Laut China Selatan.

Bagi China, melawan India tentunya sangat riskan. Melawan India bagi China, sama saja dengan merusak tatanan kebijakan *positive engagement* yang telah dibuat oleh China. Rusaknya kebijakan ini tentunya akan berdampak pada persepsi China kepada India dalam mewujudkan kepentingan strategisnya. Oleh karena itu, sikap politik China yang terkesan berhati-hati dalam menyikapi India di Laut China

Selatan dapat dipahami sebagai tindakan China yang tidak ingin mengambil resiko lebih besar terhadap keterlibatan India dalam konstelasi politik di kawasan ini.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong kerjasama India-Vietnam dalam eksplorasi minyak sebagai resistensi atas Klaim China di Laut China Selatan. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah faktor implementasi *Look East Policy* (LEP), kemudian faktor keamanan energi yang berusaha diperjuangkan oleh India dengan berinvestasi di wilayah Laut China Selatan yang diklaim memiliki kekayaan energi cukup menjanjikan. Faktor selanjutnya adalah kebebasan navigasi yang berusaha diperjuangkan oleh India di wilayah Laut China Selatan. Kebebasan navigasi tersebut diperjuangkan oleh India untuk dapat menjaga sirkulasi perdagangan mereka yang melewati Laut China Selatan agar tetap terjaga dan tidak termonopoli oleh kekuatan China dalam menguasai Laut China Selatan. Faktor berikutnya adalah prospek yang menjanjikan yang dihadirkan oleh Pemerintah Vietnam kepada India. Prospek tersebut adalah munculnya blok-blok baru yang ditawarkan oleh Vietnam kepada India

untuk dapat menjaga kehadiran India di kawasan Laut China Selatan.

Kesepakatan India dengan Vietnam telah menimbulkan gesekan tersendiri antara Pemerintah India dengan Pemerintah China. Pemerintah China secara resmi telah melayangkan nota protes kepada India atas kesepakatannya dengan Pemerintah Vietnam dalam melakukan eksplorasi minyak di kawasan yang diklaim oleh China merupakan wilayah kedaulatannya. Munculnya India dalam konstelasi politik di kawasan Laut China Selatan dapat dipahami sebagai sebuah hambatan bagi Pemerintah China dalam melancarkan ambisinya untuk menguasai kawasan Laut China Selatan. China juga tampak berhati-hati dalam mengambil sikap atas kesepakatan yang telah dijalin oleh India dengan Vietnam karena China juga tidak ingin merusak kebijakan *positive engagement* yang telah mereka ciptakan. Kebijakan *positive engagement* China sendiri merupakan kebijakan yang menjadikan India sebagai mitra perdagangan utama China. Oleh karena itu, proses perpanjangan eksplorasi minyak yang dilakukan oleh India di kawasan Vietnam dapat dikatakan efektif sebagai resistensi atas klaim China di Laut China Selatan karena mampu membuat China untuk berhati-hati dalam mengambil

sikap atas kesepakatan yang telah dijalin oleh India dengan Vietnam.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahn, S, J. & Graczyk, D. 2012. *Understanding Energy Challenges*. France: International Energy Agency.
- Caceres, S. B. 2014. *China's Strategic Interest in The South China Sea*. New York: Routledge.
- Gilpin, R. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton: Princeton University Press.
- Goh, E. 2005. *Meeting The China Challenge: The U.S in Southeast Asian Regional Security Strategies*. Washington: East West Center.
- Hiscock, G. 2012. *Earth Wars: The Battle for Global Resources*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Holsti, K. J. 1988. *Politik Internasional. Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Jackson, R dan Sorensen, G. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rogers, W. 2013. *Finding Common Ground : Energy, Security, and Cooperation in the South China Sea*: Center For A New American Security.
- Marin, D. C. (Tanpa Tahun). *The Strategies of BRICS' National Oil Companies for Energy Security : Joint Ventures Bargaining and Vertical Integration*. Paris:Paris Dauphine University.
- Masoed, M. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta:PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mas'oed, M. 2003. *Ekonomi-Politik*

- Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Oatley, T. 2004. *International Political Economy: Interest and Institution in The Global Economy*. London: Longman.
- Seppala, T. 2010. *Globalizing Resistance against War ? A Critical Analysis of the Theoretical Debate through a Case Study of the New Anti-War Movement in Britain*. Rovaniemi: Lapland University Press.
- Singh, Y. 2007. *India-Vietnam Relations The Road Ahead*. India: Institute of Peace and Conflict Studies.
- Williams, P. D. 2008. *Security Studies An Introduction*. London: Routledge.
- JURNAL**
- Majumdar, M. 2013. India Stake's in the South China Sea. *Int. J. Human. Soc. Sci.*, 2 (1): Vol. 3 No. 13
- INTERNET**
- 2 Point 6 Billion. 2011. *Beijing Demands India and Vietnam Stop Oil Joint Venture in South China Sea*. Diakses dari <http://www.2point6billion.com/news/2011/09/16/beijing-demands-india-and-vietnam-stop-oil-joint-venture-in-south-china-sea-10165.html> [11> Januari 2015]
- Energy Information Administration. 2013. *The South China Sea is a critical world trade route and a potential source of hydrocarbons, particularly natural gas, with competing claims of ownership over the sea and its resources*. diakses dari <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> [14 April 2014]
- Expose India Live. 2012. *OVL Acquired Block 6.1 in Vietnam Offshore*. Diakses dari <http://exposeindialive.com/eil/?p=20114> [11 April 2014]
- Kaplan, R. D. 2014. *The Geopolitics of energy*. Diakses dari <http://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/04/04/the-geopolitics-of-energy/> [13 Agustus 2014]
- Khrisnan, A. 2011. *South China Sea Project a "Serious Political Provocation," Chinese Paper Warns India*. Diakses dari <http://www.thehindu.com/news/international/south-china-sea-project-a-serious-political-provocation-chinese-paper-warns-india/article2459736.ece> [14> Januari 2015]
- Ministry of External Affairs, Government of India. 2011. *Incident involving INS Airavat in South China Sea*. Diakses dari <http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/3040/Incident+involving+INS+Airavat+in+South+China+Sea> [4 April 2015]
- Ministry of External Affairs Government of India. 2014. *Media Statements by Prime Minister of India and Prime Minister of Vietnam in New Delhi*. Diakses dari <http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24143/Media+Statements+by+Prime+Minister+of+India+and+Prime+Minister+of+Vietnam+in+New+Delhi+October+28+2014> [12 Januari 2015]
- Pant, H. V. 2012. *Understanding India's Interest in the South China Sea: Getting into the Seaweeds*. Diakses dari <http://csis.org/publication/understanding-indias-interest-south-china-sea-getting-seaweeds>. [23 Maret 2014]
- Reischer, R. 2012. *India's Look East Policy in the South China Sea*. Diakses dari <http://thediplomat.com/2012/08/indias-look-east-policy-in-the-south-china-sea/> [5 Januari 2015]
- Tim Redaksi. 2011. *India-Vietnam Joint*



- work must be halted. Diakses dari <http://www.globaltimes.cn/content/679263.shtml> [12 Januari 2015]
- Tim Redaksi. 2011. *China Pushes India east toward Vietnam*. Diakses dari <http://www.thanhniennews.com/special-report/china-pushes-india-east-toward-vietnam10492.html> [28 Maret 2014]
- Tim Redaksi. 2012. *Vietnam gas exploration extension offer to India may rile China*. Diakses dari <http://timesofindia.indiatimes.com/India/Vietnam-gas-exploration-extension-offer-to-India-may-rile-China/articleshow/15024051.cms>. [11 April 2014]
- Tim Redaksi. 2012. *Tug of war over BP Vietnam asset*. Diakses dari [http://www.telegraphindia.com/1101121/jsp/business/story\\_13202433.jsp](http://www.telegraphindia.com/1101121/jsp/business/story_13202433.jsp) [11 April 2014]
- Tim Redaksi. 2012. *Oil's not well in South China Sea*. Diakses dari <http://www.thehindubusinessline.com/opinion/oils-not-well-on-south-china-sea/article3380669.ece> [12 April 2014]
- Tim Redaksi. 2013. *India-Vietnam ink pact to expand oil exploration in South China Sea*. Diakses dari <http://www.dnaindia.com/india/report-india-vietnam-ink-pact-to-expand-oil-exploration-in-south-china-sea-1922248> [24 Maret 2014]
- Tim Redaksi. 2013. *Vietnam offers 6 oil and gas blocks to OVL*. Diakses dari [www.deccanherald.com/home/business/Vietnam-offers-6-oil-and-gas-blocks-to-OVL](http://www.deccanherald.com/home/business/Vietnam-offers-6-oil-and-gas-blocks-to-OVL) [25 Maret 2014]
- Tim Redaksi. 2013. *India-Vietnam ink pact to expand oil exploration in South China Sea*. Diakses dari <http://www.newindianexpress.com/nation/India-Vietnam-ink-pact-to-expand-oil-exploration-in-South-China-Sea/2013/11/21/article1902209.ece> [1 April 2015]
- Vivekananda International Fundation India. 2013. *China's Assertiveness in South China Sea: Vietnam's Response and Implications for India*. Diakses dari <http://www.vifindia.org/article/2013/november/19/china-s-assertiveness-in-south-china-sea-vietnam-s-response-and-implications-for-india> [22 Maret 2014]
- SUMBER LAIN**
- Gupta, S. 2013. Growing Tensions in South China Sea. *Institute of Peace and Conflict Studies*. Issue Brief No. 213 (May 2013)
- Khandekar, G. 2011. Central Asia on New Delhi's Geostrategic Radar. *FRIDE Commentary*. No. 18 (October 2011)
- Ott, M. C. 2010. *China's Ambitions in South China Sea*. Asia Pacific Bulletin. No. 71 (29 September 2010).
- Park, B. K. 2013. China Perceptions and Policies Toward India. East Asia Institute. Issue Briefing Middle Power Initiative 2013-01.
- Suharna, K. 2012. *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya bagi ketahanan Nasional*. Majalah Tannas. Edisi 94